



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.141.467.482.471,- ( satu triliun seratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.981.073.390,- ( tiga ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.002.700.000,- ( seratus sembilan puluh tujuh milyar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.985.440.000,- ( empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.663.748.324,- ( satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 146.329.185.066,- ( seratus empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 197.002.700.000,- ( seratus sembilan puluh tujuh milyar dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 9.500.000.000,- ( sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 51.000.000.000,- ( lima puluh satu milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 1.430.800.000,- ( satu milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 115.200.000,- ( seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 1.606.700.000,- ( satu milyar enam ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 101.000.000.000,- ( seratus satu milyar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 19.550.000.000,- ( sembilan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 47.985.440.000,- ( empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.579.475.000,- ( empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.403.965.000,- ( dua puluh delapan milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.002.000.000,- ( lima belas milyar dua juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 1.663.748.324,- ( satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 146.329.185.066,- ( seratus empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - d. Jasa Giro;
  - e. Pendapatan bunga;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - g. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - h. Pendapatan BLUD.

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.029.424.600,- ( tiga milyar dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 186.000.000,- ( seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,- ( dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,- ( dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 136.763.760.466,- ( seratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 748.486.409.081,- ( tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.257.080.000,- ( enam ratus empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.229.329.081,- ( seratus lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 643.257.080.000,- ( enam ratus empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.257.080.000,- ( enam ratus empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 105.229.329.081,- ( seratus lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS) direncanakan sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.279.596.093.763,- ( satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.115.856.227.007,- ( satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 662.577.844.355,- ( enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.881.933.270,- ( empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 ( nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 ( nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.652.449.382,- ( dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000,- ( sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 662.577.844.355,- ( enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh

empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 343.702.418.274,- ( tiga ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.684.689.248,- ( dua ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.446.034.392,- ( lima belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.202.690.305,- ( dua puluh tujuh milyar dua ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.454.081.590,- ( satu milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 964.560.000,- ( sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 63.123.370.546,- ( enam puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 417.881.933.270,- ( empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.013.154.545,- ( enam puluh empat milyar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).



- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp. 173.506.589.790,- ( seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.926.119.240,- ( tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.806.674.595,- ( tiga puluh satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.381.395.000,- ( delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 36.104.699.500,- ( tiga puluh enam milyar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 70.143.300.600,- ( tujuh puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 25.652.449.382,- ( dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.547.559.400,- ( dua belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.785.327.182,- ( sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.319.562.800,- ( dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

### Pasal 19

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).

### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.733.034.167,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
  - f. Belanja modal Aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.572.001.040,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.261.498.780,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.419.114.304,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.809.016.475,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan juta enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.471.403.568,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp. 3.572.001.040,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu empat puluh rupiah).

### Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 24.261.498.780,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.240.720,- ( seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.400.589.466,- ( empat milyar empat ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.056.100,- ( delapan belas juta lima puluh enam ribu seratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.675.987.180,- ( satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 169.366.879,- ( seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.689.767.266,- ( lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.521.000,- ( sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.651.029.269,- ( satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,-( Nol rupiah).
  - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,-( Nol rupiah).
  - (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,-( Nol rupiah).
  - (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,-( Nol rupiah).
  - (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf n direncanakan sebesar Rp. 0,-( Nol rupiah).
  - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada huruf o direncanakan sebesar Rp. 9.240.626.300,- ( sembilan milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
  - (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 1.264.314.600,- ( satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 66.419.114.304,- ( enam puluh enam milyar empat ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.981.339.584,- ( enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,- ( seratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.032.774.720,- ( satu milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 49.809.016.475,- ( empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan juta enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.300.110.754,- ( tiga puluh tiga milyar tiga ratus juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.555.672.021,- ( tiga belas milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.253.233.700,- ( dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

### Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 7.471.403.568,- ( tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.782.500,- ( dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada) huruf c direncanakan sebesar Rp. 238.916.868,- ( dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.517.704.200,- ( enam milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 26

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya.

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.006.832.589,- ( dua belas milyar enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 160.621.894.914,- ( seratus enam puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.621.894.914,- ( seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.087.881.376,- ( tujuh puluh satu milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.534.013.538,- ( seratus tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- ( delapan belas milyar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 138.128.611.292,- ( seratus tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.621.894.914,- ( seratus enam puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

### Pasal 33

Belanja Modal Bangunan Gedung Dumai Islamic Center dapat digunakan setelah adanya serah terima Pembangunan yang dilaksanakan dari TJSP kepada Pemerintah Daerah;

### Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai

Pada Tanggal, ~~21~~ Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI A



**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>392.981.073.390</b>
4.1.01	Pajak Daerah	197.002.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.985.440.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.324
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.329.185.066
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>748.486.409.081</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.257.080.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.229.329.081
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.141.467.482.471</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.115.856.227.007</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	662.577.844.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.881.933.270
5.1.05	Belanja Hibah	25.652.449.382
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>151.733.034.167</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.572.001.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.261.498.780
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.419.114.304
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.809.016.475
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.471.403.568
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.006.832.589</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.279.596.093.763</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(138.128.611.292)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>178.621.894.914</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.087.881.376
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>178.621.894.914</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>160.621.894.914</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>22.493.283.621</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.320.089.377.384</b>

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.472.469.172
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.472.469.172
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	48.472.469.172
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	107.534.013.538
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	107.534.013.538
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	107.534.013.538
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>178.621.894.914</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	18.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	18.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	18.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>160.621.894.914</b>

Walikota Dumai

PAISAL

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>392.981.073.390</b>
4.1.01	Pajak Daerah	197.002.700.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.915.700.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.915.700.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	30.400.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	30.400.000
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	53.900.000
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	53.900.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.519.200.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.519.200.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	576.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	576.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	278.400.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	278.400.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	213.600.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	213.600.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	526.800.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	526.800.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	386.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	386.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.500.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	120.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	120.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.300.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.300.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	583.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	583.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	71.500.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	71.500.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	445.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	445.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	258.500.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	258.500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.700.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.700.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.193.750.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.193.750.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	259.200.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	259.200.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.325.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.325.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	3.750.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	3.750.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.475.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.475.000
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	33.000.000
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	33.000.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	1.500.000
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	1.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	51.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	51.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.800.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.800.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.800.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.430.800.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.430.800.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.430.800.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.606.700.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	906.780.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	906.780.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	699.920.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	699.920.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	101.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	101.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	101.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.550.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	19.550.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.550.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.985.440.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.579.475.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	750.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	220.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	494.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	36.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	250.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	28.403.965.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	135.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	74.722.500
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	74.722.500
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.808.802.500
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	27.808.802.500
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.440.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.440.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	285.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	285.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.002.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.990.050.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	14.990.050.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.324
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.663.748.324
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.663.748.324
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.663.748.324
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.329.185.066
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.029.424.600
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.029.424.600
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	3.029.424.600
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	186.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	186.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	186.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.750.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.600.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.600.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.600.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	136.763.760.466
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	136.763.760.466
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	136.763.760.466
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>748.486.409.081</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.257.080.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	643.257.080.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	154.499.794.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.228.962.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	26.768.038.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90.682.864.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.503.616.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.397.488.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	429.554.051.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	429.554.051.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.340.205.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.340.205.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.863.030.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.738.030.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.125.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.229.329.081
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	105.229.329.081
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105.229.329.081
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.706.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.184.831.606
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.534.998.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.803.499.475
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.141.467.482.471</b>

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.115.856.227.007</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	662.577.844.355
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	343.702.418.274
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	245.026.627.549
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	217.772.914.749
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.253.712.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.526.057.359
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.281.869.211
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.244.188.148
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.308.761.480
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.308.761.480
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.332.706.506
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.332.706.506
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.413.470.708
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.835.450.716
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.578.019.992
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.242.448.918
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.261.352.038
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.981.096.880
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.157.253.470
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.157.253.470
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.008.284
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.298.284
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.710.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.075.200.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.000.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.075.200.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	527.172.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	462.600.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	64.572.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.580.712.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.387.260.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	193.452.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	500.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	500.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	210.684.689.248
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.108.535.460
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	170.610.372.248
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.498.163.212
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.547.864.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.403.864.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	144.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	15.068.289.788
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15.068.289.788
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.960.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.960.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.446.034.392
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.387.215.752
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	48.826.050
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	204.750.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	324.187.500
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	51.187.500
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	119.437.500
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.607.486.114
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	61.425.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.931.200
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	54.828.638
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	4.595.500.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	315.656.250
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	688.066.167
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	18.060.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.750.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	45.532.167
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.224.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	587.797.047
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	452.953
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.370.752.473
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.024.618.473
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	299.884.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	46.250.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.202.690.305
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.003.079.450
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.003.079.450
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600



Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	179.046.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	179.046.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	106.118.250
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	106.118.250
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	5.292.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	5.292.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.610.905
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.610.905
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.846.100.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.400.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	19.600.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.100.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.697.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.729.800.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.729.800.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.910.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.910.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.454.081.590
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.073.700
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.073.700
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.040
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.040
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.419.800
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.419.800
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.500
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.500
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.212.818.550
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	39.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	61.750.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.750.000

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	22.750.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	331.500.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	11.700.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.300.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.443.550
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	656.500.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	60.125.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	61.750.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	61.702.452
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	47.548
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	964.560.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	364.560.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	364.560.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	63.123.370.546
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	63.123.370.546
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	63.123.370.546
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.881.933.270
5.1.02.01	Belanja Barang	64.013.154.545
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.483.774.091
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.567.625.107
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.468.492.098
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.145.215.745
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	37.098.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	153.126.721
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.467.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.450.315.964
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	211.066.976
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.517.147.802
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.124.523.763
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	197.559.716
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	785.009.601
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	640.672.941
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.601.198
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	52.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.918.674.442
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.578.686.435
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.497.300

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.160.090.504
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	57.183.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.239.531.543
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.586.668.350
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.169.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.234.192.400
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	185.683.200
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.772.800
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	311.024.600
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	126.692.840
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	97.728.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.528.021
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.024.850
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	198.065.184
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	117.207.190
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	80.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.529.380.454
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	3.101.664.774
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	427.715.680
5.1.02.02	Belanja Jasa	173.506.589.790
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	133.007.082.321
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.536.864.547
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.569.300.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	43.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	893.793.700
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	17.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.200.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	183.525.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	673.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.897.600.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.712.589.400
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	494.451.540
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.057.568.600
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.442.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	801.700.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.800.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	504.100.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	134.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.426.880.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	448.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	19.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	109.490.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.420.365.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	281.733.860
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	196.909.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.982.802.110
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.275.011.350
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.786.643.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.634.545.977
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.056.261.400
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	65.850.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.575.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.328.206.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	13.121.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.106.250
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.640.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	60.722.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	199.995.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.409.122.150
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	26.096.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	381.762.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.076.331.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.210.316.659
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	662.848.350
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.623.720.036
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	30.664.350
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.540.615.980
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	20.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	750.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	11.971.655.462
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.912.175.026
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.537.115.536
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.211.584.906
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.813.344
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.661.240
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.132.907.456
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	2.625.669.456
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	24.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	235.546.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	186.400.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	226.190.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	613.102.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	216.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.453.319.751

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	202.501.751
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	131.208.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.119.610.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	147.500.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	108.500.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	39.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.695.127.777
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	633.033.043
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	790.586.344
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	59.845.742
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	211.662.648
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.759.036.875
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	513.596.875
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	250.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	14.980.440.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	600.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	415.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.399.440.584
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	364.653.584
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.509.640.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	525.147.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.926.119.240
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.903.348.000
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	1.903.348.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.566.093.510
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	140.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	448.800.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	463.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.780.359.857
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.329.534.440
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	879.775.093
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	416.546.822
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	591.377.243
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.696.357.540
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.480.000

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.813.450.601
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.195.000
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	31.630.000
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	100.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	265.674.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	185.554.268
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	377.358.646
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.426.570.198
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.900.903.398
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	30.000.000
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	314.316.800
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	181.350.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.017.607.532
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	396.020.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	13.511.462.532
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.125.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	12.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	31.806.674.595
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.806.674.595
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.955.566.337
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.680.148.250
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.185.008
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.775.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.381.395.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.381.395.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	251.395.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.080.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	90.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.960.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.104.699.500
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.104.699.500
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.104.699.500
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.143.300.600
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.143.300.600

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.143.300.600
5.1.05	Belanja Hibah	25.652.449.382
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.547.559.400
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	12.047.559.400
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	12.047.559.400
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.785.327.182
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.277.097.182
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.277.097.182
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.408.230.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.060.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.348.230.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.744.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.744.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.744.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>151.733.034.167</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.572.001.040
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.572.001.040
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.572.001.040
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.572.001.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.261.498.780
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	140.240.720
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	21.182.720
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	21.182.720
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	119.058.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	4.314.800
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	13.249.200
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	37.576.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	63.918.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.400.589.466
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.400.589.466

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	723.936.966
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.459.112.500
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	77.540.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.640.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.056.100
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	16.448.100
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.041.700
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.406.400
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.608.000
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.608.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.675.987.180
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.252.601.864
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	143.544.844
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.323.960
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.086.733.060
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	272.620.216
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	77.740.216
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	194.880.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.765.100
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	150.765.100
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	169.366.879
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	169.366.879
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.001.678
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.240.397
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	10.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	130.624.804
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.689.767.266
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.199.401.986
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.049.821.958
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.171.128.988
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	495.969.600
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	235.350.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.247.131.440
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	490.365.280
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	490.365.280
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.521.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	11.521.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	11.521.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.651.029.269
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.062.616.097
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.062.616.097
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	588.413.172



Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	57.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	271.053.792
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	260.359.380
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.240.626.300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.240.626.300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.240.626.300
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.264.314.600
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.264.314.600
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.264.314.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.419.114.304
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	64.981.339.584
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.981.339.584
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57.126.097.946
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	268.144.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	185.600.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	186.498.500
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	414.999.138
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.800.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	105.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	105.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	105.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	300.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	300.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	300.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.032.774.720
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.032.774.720
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.032.774.720
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.809.016.475
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.300.110.754
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	32.309.260.754
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	30.030.502.454
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.278.758.300
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	990.850.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	990.850.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.555.672.021
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	988.566.609
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	988.566.609
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	12.567.105.412
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	12.567.105.412
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	200.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Dumai  
 Nomor : 67 Tahun 2021  
 Tanggal : 24 Desember 2021

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.253.233.700
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.253.233.700
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	2.248.910.777
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	4.322.923
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.471.403.568
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	185.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	185.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	185.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	29.782.500
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	29.782.500
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	29.782.500
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	238.916.868
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	238.916.868
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	52.774.500
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	186.142.368
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.517.704.200
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.517.704.200
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.517.704.200
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	500.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	500.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	500.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.006.832.589</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.279.596.093.763</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(138.128.611.292)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>178.621.894.914</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.087.881.376
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	22.615.412.204
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	22.615.412.204
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	22.615.412.204